

Peran Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

S. Amanah

siti_amanah@ipb.ac.id

Mayor Komunikasi Pembangunan, Gedung Departemen KPM IPB Wing 1 Level 5, Jalan Kamper Kampus IPB Darmaga, Telp. 0251-8420252, Fax. 0251-8627797

Abstrak

Status and condition of coastal community relate to several factors included ecological characteristics, socio economic and cultural characteristics, natural and geographical characteristics, government policy, local wisdom and knowledge, and their cosmopolites. Up to now, the coastal community especially small fishery communities still face the problems of lack of information, limited access of asset and capital, and dependency to the external assistances. This situation was also found at the north Bali, whereas most of the fishery communities ran their businesses traditionally. Effective development communication strategy and program would help the community to be more aware of coastal resources management. The study was conducted at the Gerokgak and Buleleng District, North Bali. A number of 128 respondents involved in the research and 10 informal leaders contributed information about various program in the region. Research results showed that development communication was urged to be able to provide more facilitation in terms of empowering the fishery group, capacity improvement of the group in coastal resources management; enlarging people choices, implementing participatory approaches, and strengthening network to support the community in managing the business.

Key words: coastal community, development communication, empowerment

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Masyarakat pesisir memiliki kehidupan yang khas, dihadapkan langsung pada kondisi ekosistem yang keras, dan sumber kehidupan yang bergantung pada pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut (selanjutnya disingkat SDP). Masyarakat pesisir terutama *nelayan kecil*, masih terbelit oleh persoalan kemiskinan dan keterbelakangan. Terdapat persoalan tertentu terkait dengan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi, sehingga masyarakat pesisir masih tertinggal (Hanson 1984). Rendahnya taraf hidup masyarakat pesisir dan akses yang terbatas akan aset dan sumber-sumber pembiayaan bagi nelayan kecil merupakan persoalan utama yang dijumpai di kawasan pesisir. Nelayan-pun sangat rentan terhadap tekanan pemilik modal.

Kegiatan pembangunan di kawasan pesisir tidak terlepas dari daya dukung lingkungan, keberlangsungan

sumberdaya alam dan dilakukan secara terpadu oleh berbagai pihak terkait dengan menekankan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Ketersediaan sumberdaya alam di daratan seperti hutan, bahan tambang, dan mineral serta lahan pertanian produktif semakin menipis sedangkan kebutuhan penduduk terus bertambah sejalan dengan jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat dan diprediksikan akan mencapai 267 juta jiwa pada tahun 2015. Kebutuhan penduduk tersebut tidak akan mampu dipenuhi seluruhnya oleh sumberdaya alam di daratan (Dahuri 2000) mengingat luas daratan Indonesia hanya sepertiga dari luas Indonesia keseluruhan, yaitu 1.926.337 km². Sektor perikanan dan kelautan sangat potensial untuk dikembangkan, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.506 buah pulau, dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, dan luas laut sekitar 3,1 juta km². Selain itu, Indonesia juga memiliki hak

pengelolaan sumberdaya alam hayati dan nonhayati di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yaitu perairan yang berada 12 hingga 200 mil dari garis pantai titik-titik terluar kepulauan Indonesia, yang luasnya 2.7 juta km² berdasarkan *United Convention on the Law of the Seas*.

Kegiatan sektor perikanan dan kelautan, memiliki dua bidang usaha (Amanah dan Yulianto 2002) yaitu perikanan darat dan perikanan tangkap. Hasil penelitian tentang pendekatan penyuluhan pada masyarakat pesisir (Amanah *et al.* 2004) memperlihatkan bahwa setiap komunitas memiliki keunikan dan berbeda dalam hal nilai, orientasi, dan kebutuhan pengembangan diri, kelompok, komunitas, serta daya dukung lingkungan fisik. Dalam hal ini komunikasi pembangunan dapat menjadi wahana transformasi situasi masyarakat dari sekarang ke kondisi yang lebih baik.

Kabupaten Buleleng memiliki panjang pantai sekitar 144 km dan ada enam dari sembilan kecamatannya yang berbatasan langsung dengan pantai utara. Kecamatan Buleleng dan Grokgak sangat berprospek untuk berkembang menjadi kawasan perikanan dan wisata bahari. Sampai saat ini masyarakat pesisir di kedua kecamatan tersebut bergantung pada pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, baik untuk usaha perikanan, maupun untuk usaha jasa wisata. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah bahwa proses-proses komunikasi pembangunan belum berlangsung simultan, dan nelayan masih dihadapkan pada persoalan klasik seperti hasil tangkapan yang bervariasi, keterbatasan akses pada sumber-sumber permodalan, pasar, dan program penyuluhan yang belum berjalan sesuai harapan. Telaahan tentang permasalahan yang dihadapi nelayan,

penyebab masalah, alternatif penyelesaian masalah, diperlukan untuk mendesain rancangan strategi komunikasi pembangunan yang relevan. Tanpa strategi komunikasi pembangunan yang jitu, masyarakat pesisir akan makin tertinggal. Terdapat beberapa program andalan pemerintah dalam konteks komunikasi pembangunan, namun belum memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir. Oleh karenanya, penyajian pada makalah ini berfokus pada kondisi masyarakat pesisir dan peran komunikasi pembangunan dalam pemberdayaan komunitas, kasus Kabupaten Buleleng.

1.2 Tujuan

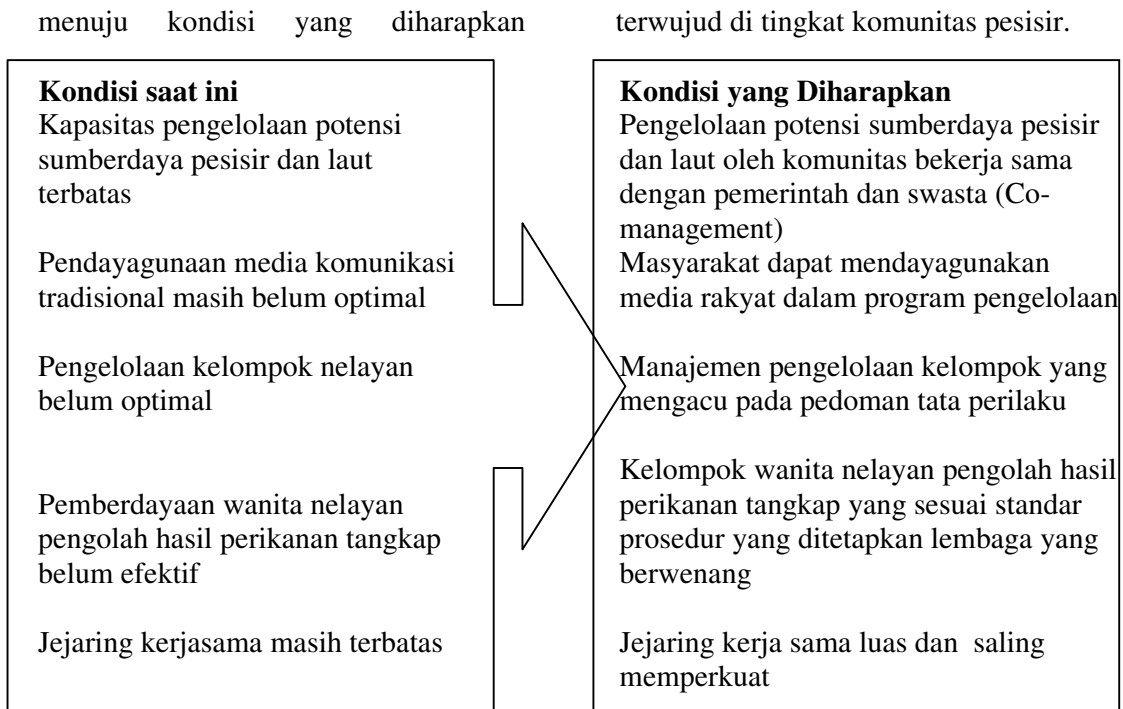
Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah (1) mendeskripsikan kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir, khususnya komunitas nelayan; dan (2) menganalisis peran dan strategi alternatif komunikasi pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.

1.3 Kegunaan

Bagi pengambil kebijakan di bidang pengembangan masyarakat pesisir, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi sebagai referensi dalam mengembangkan masyarakat pesisir melalui pendekatan dan strategi komunikasi yang efektif.

2. Perumusan Masalah

Masalah merupakan faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan. Dalam konteks masyarakat pesisir di lokasi kajian, ada kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi ideal yang diharapkan (Gambar 1). Secara konseptual, komunikasi pembangunan berperan menjembatani kondisi saat ini



Gambar 1. Kesenjangan Kondisi yang Dihadapi Masyarakat Pesisir

Kondisi nelayan di Kabupaten Buleleng dicirikan oleh tipologi nelayan kecil, dan armada penangkapan ikan oleh mayoritas nelayan di Kecamatan Buleleng dan Grokgak adalah perahu bermotor tempel. Nelayan di Kecamatan Buleleng lebih banyak menggunakan pancing ulur dan tonda untuk menangkap ikan, sedangkan seser dan pancing ulur lebih banyak digunakan oleh nelayan di Kecamatan Grokgak. Jenis ikan hasil tangkapan umumnya berupa tongkol, teri, walang dan tuna. Sampai saat ini, masyarakat pesisir setempat masih belum terlepas dari persoalan klasik yang dihadapi nelayan kecil yakni keterbatasan aset, akses, dan peluang untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Upaya peningkatan kualitas hidup nelayan kecil sulit terwujud tanpa adanya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan sumberdaya manusia. Menghadapi permasalahan tersebut, komunikasi pembangunan diperlukan peran utamanya sebagai sebuah proses

yang dialogis dalam penyampaian ide, informasi, dan inovasi, oleh pihak-pihak terkait guna menunjang terjadinya proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya. Perubahan tersebut dampaknya dapat dilihat pada tingkat individu, keluarga, kelompok, organisasi, komunitas, dan masyarakat yang lebih luas. Proses-proses komunikasi pembangunan akan memiliki dampak luas apabila dilaksanakan secara sistemik dan berkelanjutan.

3. Konsepsi dan Hasil Penelitian Terdahulu tentang Komunikasi Pembangunan dan Pemberdayaan

3.1 Komunikasi Pembangunan

Nasution (2004) mengutip pernyataan Hedebo tentang tiga aspek komunikasi dan pembangunan yang berkaitan dengan tingkat analisisnya. Ketiga aspek tersebut meliputi hal berikut: (i) Pendekatan yang berfokus

pada pembangunan suatu bangsa, dan peran media massa menyumbang upaya tersebut. Di sini, politik dan fungsi-fungsi media massa dalam pengertian yang umum merupakan objek studi, sekaligus masalah-masalah struktur organisasional dan pemilikan, serta kontrol terhadap media. Untuk studi jenis ini, digunakan istilah kebijakan komunikasi dan merupakan pendekatan yang paling luas dan bersifat umum; (ii) Pendekatan untuk memahami peranan media massa dalam pembangunan nasional, namun lebih jauh spesifik. Persoalan utama dalam studi ini adalah penggunaan media agar dapat dipakai secara efisien, untuk mengajarkan pengetahuan tertentu bagi masyarakat suatu bangsa; dan (iii) Pendekatan yang berorientasi kepada perubahan yang terjadi pada suatu komunitas lokal atau desa. Studi jenis ini mendalami bagaimana aktivitas komunikasi dapat dipakai untuk mempromosikan penerimaan yang luas akan ide-ide dan produk baru.

Hasil penelitian Kifli (2007) tentang strategi komunikasi pembangunan pada komunitas dayak di Kalimantan Barat menemukan bahwa berbagai bentuk materi komunikasi yang selama ini tersedia, ternyata belum dapat dipahami atau diakses dengan optimal oleh orang Dayak. Materi komunikasi dari luar baik berupa materi tercetak maupun elektronik, seperti brosur, leaflet, majalah atau program radio dan televisi, tidak dapat diakses. Kendala dari sisi fisik disebabkan karena keterisoliran geografis, sedangkan kendala sisi bahasa menyebabkan mereka tidak dapat memahami isi (*content*) yang terkandung di dalamnya. Konsep dan strategi pembangunan yang cenderung seragam, belum mampu menjangkau komunitas Dayak secara memadai. Berbagai asumsi dan prasyarat penerima (*receiver*) dari kebijakan strategi

komunikasi tersebut tidak mampu dipenuhi oleh sebagian masyarakat, termasuk oleh masyarakat Dayak. Penelitian Amanah (2007) tentang pengembangan masyarakat pesisir mengungkap pula bahwa terdapat korelasi positif yang nyata antara kompetensi komunikasi yang dimiliki oleh penyuluh terhadap perilaku masyarakat pesisir dalam mengelola sumberdaya pesisir yang dimiliki. Selain faktor keterisoliran dan kompetensi komunikasi, strategi komunikasi pun berpengaruh terhadap efektifitas komunikasi.

Harris (1996) menyatakan bahwa pendekatan komunikasi pembangunan partisipatif perlu dikembangkan untuk mengembangkan masyarakat di tingkat bawah melalui pendekatan pendidikan non formal. Terkait dengan pendekatan pembangunan yang diterapkan di Indonesia, Waskita (2005) mencermati bahwa pembangunan sampai saat ini masih terlalu berfokus pada hal-hal fisik dan terukur. Hal ini pada gilirannya, berkontribusi terhadap model komunikasi yang dianut cenderung menunjukkan pola interaksi yang terbatas dan berkaitan dengan kekuasaan dan pelayanan. Alternatif model komunikasi yang diusulkan adalah komunikasi dialogis antar orang yang terlibat dalam proses pembangunan.

3.2 Pemberdayaan

Pemberdayaan memiliki berbagai interpretasi, pemberdayaan dapat dilihat sebagai suatu proses dan program. Payne (1997) mengemukakan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan kekuatan (*daya*) untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi

dan sosial dalam melakukan tindakan. Pemberdayaan dilakukan dengan jalan meningkatkan kapasitas, pengembangan rasa percaya diri untuk menggunakan kekuatan, dan mentransfer kekuatan dari lingkungannya. Sebagai suatu proses, pemberdayaan adalah usaha yang terjadi terus menerus sepanjang hidup manusia.

Bowling dan Barbara (2002) mengemukakan bahwa program penyuluhan dapat membentuk perubahan perilaku melalui prinsip berbagi pengetahuan, dan pengalaman dengan masyarakat. Bersama-sama masyarakat, dapat dilakukan berbagai kegiatan yang mengarah pada pembentukan perilaku masyarakat. Pemberdayaan sebagai sebuah program mempunyai makna bahwa pemberdayaan merupakan tahapan-tahapan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dalam kurun waktu tertentu. Dalam konteks ini, pelaksanaan program pemberdayaan dibatasi waktu, sehingga tampak sebagai kegiatan keproyekan. Kondisi seperti ini tentu tidak menguntungkan bagi pelaksana program maupun komunitas target, karena sering terjadi kegiatan terputus di tengah jalan, dan kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam program.

Pemberdayaan masyarakat pesisir mencakup dua dimensi yaitu budaya dan struktur sosial (Satria 2001). Selain itu, pemberdayaan dalam komunitas nelayan akan lebih berhasil jika menerapkan prinsip kejelasan tujuan, prinsip dihargainya pengetahuan dan penguatan nilai lokal, prinsip keberlanjutan, prinsip ketepatan kelompok sasaran atau tidak bias pada nelayan pada strata maupun golongan tertentu, dan prinsip kesetaraan *gender*, artinya baik pria maupun wanita memiliki secara aktif diakui hak-haknya dalam masyarakat, memiliki status dan peran sesuai budaya setempat, dan terlibat dalam proses

pengambilan keputusan dalam keluarga dan masyarakat.

Hasil penelitian Mubyarto, *et al.* (1984) menyimpulkan bahwa modernisasi perikanan melalui introduksi kapal-kapal motor telah menimbulkan jurang yang bertambah lebar antara mereka yang mampu dan yang tidak mampu memanfaatkan teknologi tersebut, bahkan introduksi budidaya tambak udang yang padat modal hanya berpihak pada kelompok kaya atau dengan perkataan lain pembangunan berakibat pada menguatnya marginalisasi kelompok miskin. Dampak positif maupun negatif dari modernisasi perikanan, khususnya bagi masyarakat nelayan, petani petambak, maupun kelompok masyarakat pesisir yang lain (pengolah hasil laut, pemberi jasa wisata bahari dan lain-lain) perlu diantisipasi, yaitu melalui penerapan paradigma pembangunan yang lebih menekankan pada aspek manusianya. Implikasinya adalah pembangunan akan berkelanjutan (*sustainability*), karena program-program pembangunan menciptakan manusia-manusia yang berdaya dan mandiri. Soedijanto (1997) menyatakan bahwa pembangunan yang hanya menekankan pada produktivitas, justru hanya menimbulkan ketergantungan petani pada pemerintah.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, peran komunikasi pembangunan sangat dibutuhkan dalam membantu masyarakat pesisir, khususnya nelayan dalam menghadapi modernisasi. Seperti telah dikemukakan oleh van Den Ban dan Hawkens (1999) bahwa peranan berbagai program penyuluhan sebagai implementasi komunikasi pembangunan adalah dengan membantu petani untuk mengambil keputusan sendiri dengan cara menambah pilihan bagi mereka, dan dengan cara menolong mereka mengembangkan wawasan mengenai konsekuensi dari masing-

masing pilihan tersebut. Upaya pemberdayaan nelayan kecil menurut Satria (2001) perlu memahami struktur sosial masyarakat nelayan, tidak hanya melihat aspek ekonomi atau teknologi saja, melainkan juga aspek sosial-budaya perlu diperhatikan, sehingga program tidak lagi hanya bersifat “ingin cepat selesai”.

4. Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan di dua wilayah pesisir Kabupaten Buleleng yakni di Kecamatan Grokgak dengan jarak lebih kurang 55 km sebelah barat ibu kota kabupaten, dan di Kecamatan

Buleleng yang letaknya lebih kurang 8 km dari ibu kota kabupaten. Penelitian dilaksanakan mulai tahun 2004 s.d. 2006. Responden penelitian adalah pelaku utama dalam usaha penangkapan, pengolahan, pembudidaya dan pemasar. Tercatat lebih kurang 692 rumah tangga perikanan (RTP) melaksanakan usaha di dua wilayah tersebut dan 159 RTP dipilih untuk sebagai responden secara acak; namun untuk keperluan analisis statistik dipilih responden yang memiliki aktivitas serupa untuk mewakili populasi yaitu 128 RTP.

Tabel 1.

Responden Penelitian di Kecamatan Grokgak dan Pemuteran, 2006

No	Kecamatan dan Kegiatan Usaha		Rumah Tangga Perikanan (RTP)	Responden (Rumah tangga)	Representasi (Rumah tangga)
1	Gerokgak	Nelayan ikan konsumsi	246*)	44	44
		Pengolah	60	21	-
		Pengolah dan pemasar	20	11	11
		Pembudidaya	25	10	-
		Jumlah	341	86	55
2	Buleleng	Nelayan ikan konsumsi	248*)	49	49
		Pengolah dan pemasar	109	24	24
		Jumlah	351	73	73

*) Armada motor tempel

Data primer yang diperoleh dari responden meliputi (1) keragaan sosial ekonomi responden penelitian; (2) informasi tentang SDP terutama masalah penurunan kualitas SDP meliputi jenis ikan hasil tangkapan, kualitas terumbu karang, dan kondisi pantai; (3) program pemberdayaan dan atau intervensi yang pernah berlangsung, hasil yang dicapai dan kontinuitas program; (4) kompetensi komunikasi penyuluh/fasilitator program pemberdayaan; (5) kualitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan

perikanan. Selain dari responden, data diperoleh pula dari sumber sekunder yakni Dinas Kelautan dan Perikanan, Kantor Kecamatan, Badan Pusat Statistik, literatur dan media. Paduan metode wawancara semi terstruktur, pengamatan, dan diskusi dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi selama penelitian. Data dianalisis secara deskriptif dengan menerapkan konsep Checkland (1984) tentang soft system methodology (SSM). Di dalam SSM dikemukakan bahwa untuk mendinamiskan aktivitas manusia

sebagai sebuah sistem, perlu adanya desain konsep tentang CATWOE. CATWOE merupakan singkatan dari *Customers (C)*, *Actors (A)*, *Transformation (T)*, *Welstanchaung (W)*, *Owner (O)* dan *Environment (E)*. Konsep CATWOE digunakan menganalisis peran para pihak dalam pengembangan strategi komunikasi pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

5.1 Wilayah dan Gambaran Masyarakat Pesisir di Lokasi Penelitian

Buleleng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali, terletak di Bagian Utara dengan luas wilayah 1.366 km², dan pernah menjadi Ibukota Provinsi pasca kemerdekaan Republik Indonesia hingga tahun 1960-an. Batas-batas wilayah Kabupaten Buleleng adalah di Utara berbatasan dengan Laut Jawa, di Barat berbatasan dengan Kabupaten Jembrana, di Selatan

berbatasan dengan Kabupaten Tabanan, Badung, dan Bangli, dan di Timur berbatasan dengan Kabupaten Karang Asem. Jumlah penduduk berdasarkan hasil registrasi pada tahun 2007 berjumlah sebanyak 643.274 jiwa, dari jumlah 167.780 Kepala Keluarga. Dari jumlah tersebut terdiri dari penduduk perempuan sebanyak 320.839 jiwa atau 49,88% dan penduduk laki-laki sebanyak 322.435 jiwa atau 50,12 % dari kondisi tersebut tercermin penduduk laki-laki relatif dominan jika dibandingkan dengan penduduk perempuan. Penyerapan tenaga kerja per lapangan usaha di Kabupaten Buleleng pada tahun 2005-2006 (Tabel 2) memperlihatkan bahwa sektor pertanian dalam arti luas menyerap paling banyak tenaga kerja dibanding sektor lain. Ini berarti, kebijakan pemerintah harus mampu memaklukan pembangunan pertanian dalam arti luas yang menjadi tumpuan hidup sebagian besar penduduk Kabupaten Buleleng.

Tabel 2.

Penyerapan Tenaga Kerja per Lapangan Usaha di Kabupaten Buleleng dari Tahun 2005 s.d. 2006

NO.	LAPANGAN USAHA	TAHUN 2005		TAHUN 2006	
		Penduduk yang bekerja (Orang)	Persentase (%)	Penduduk yang bekerja (Orang)	Persentase (%)
1	Pertanian dalam arti luas	141.839	42,07	141.839	42,07
2	Pertambangan dan Penggalian	3.910	1,16	3.910	1,16
3	Industri	50.033	14,84	50.033	14,84
4	Listrik, Gas & Air Minum	1.450	0,43	1.450	0,43
5	Bangunan	19.319	5,73	19.319	5,73
6	Perdagangan	72.285	21,44	72.285	21,44
7	Angkutan & Komunikasi	14.565	4,32	14.565	4,32
8	Kuangan/Persewaan	2.933	0,87	2.933	0,87
9	Jasa-Jasa	30.816	9,14	30.816	9,14
Jumlah		337.151	100,00	337.151	100,00

Sumber: Buleleng dalam Angka Tahun 2008

Secara umum seperti tampak pada Tabel 3, mayoritas responden berusia produktif, mayoritas berpendidikan formal SMP tidak tamat, dengan pengalaman usaha terbanyak antara 12 sampai dengan 20 tahun, pendapatan dari usaha perikanan bervariasi mulai Rp 420 ribu sampai lebih dari Rp 1 juta per bulan. Tanggungan keluarga umumnya 3-4 orang.

Pengelolaan pesisir kabupaten Buleleng dibagi ke dalam tiga wilayah pengembangan yaitu (1) Buleleng Barat dengan usaha utama adalah penangkapan ikan di laut, budi daya laut, dan pembenihan, (2) Buleleng Tengah untuk usaha penangkapan ikan, dan pengolahan hasil perikanan, dan (3) Buleleng Timur untuk penangkapan ikan hias, ikan konsumsi, dan pengolahan (Dinas Kelautan dan Perikanan Buleleng 2003). Guna mengganti-sipasi hal tersebut, strategi komunikasi pembangunan perikanan dan kelautan harus berfokus pada peningkatan kemampuan nelayan dalam pengelolaan teknologi penangkapan, penguatan kapasitas permodalan, kemampuan pengelolaan keuangan, dan yang paling urgen adalah perubahan sikap dan perilaku yang positif memanfaatkan kekayaan bahari.

Kegiatan nelayan di Grokgak dan Buleleng adalah melakukan penangkapan ikan. Beberapa desa pesisir di Kecamatan Buleleng seperti

Kaliasem, Tukadmungga, dan Anturan melakukan kegiatan memandu wisatawan menikmati pemandangan laut dan mengamati perilaku lumba-lumba di pagi hari-hari, dan perempuan nelayan menjual ikan hasil tangkapan. Kegiatan nelayan di Kecamatan Grokgak meliputi budidaya ikan hias, memandu wisata laut berupa Taman Laut, budidaya bandeng, dan pembenihan kerapu, dan pengolahan ikan oleh wanita nelayan. Aktivitas penangkapan ikan di dua lokasi kajian sangat dipengaruhi oleh musim, yaitu pada musim panen ikan, nelayan umumnya berangkat pada dini hari dan pulang lebih cepat (sekitar pukul 2.00 atau 3.00 dini hari melaut dan kembali pukul 7.00 hingga pukul 8.00). Pada saat populasi ikan rendah, nelayan di dua desa melakukan kegiatan tani dan mengandalkan hasil ikan di alat tangkap bagan dan berangkat pukul 18.00 petang dan baru kembali keesokan hari pada pukul 06.00 pagi hari. Nelayan membutuhkan pendampingan dalam hal pemasaran hasil, pemeliharaan terumbu karang, kawasan pesisir, dan penguatan kelembagaan kelompok nelayan. Proses-proses komunikasi pembangunan yang saat ini berlangsung masih terlalu berfokus pada sosialisasi informasi tentang program kerja dan prioritas pemerintah, belum mengarah pada terobosan pendayagunaan saluran dan media komunikasi lokal untuk memperkuat jaringan sosial masyarakat pesisir.

Tabel 3.
Ciri-ciri Responden di Dua Lokasi Penelitian, 2006

Perihal	Gerokgak		Buleleng	
	Jumlah	%	Jumlah	%
1. Jenis kelamin (jiwa):				
Laki-laki	43	78,2	48	65,8
Perempuan	12	21,8	25	34,2
2. Usia (tahun):				
a. Kurang dari 32	6	10,9	8	11,0
b. 32 – < 42	23	43,8	32	43,8
c. 42 – < 52	18	31,5	23	31,5
d. ≥ 52	8	13,7	10	13,7
3. Pendidikan formal (tahun)				
a. < 4	8	14,5	1	13,4
b. 4 - < 6	10	18,2	15	20,5
c. 6 - < 8	24	43,6	30	41,1
g. ≥ 8	13	23,6	27	37,0
4. Jumlah tanggungan (jiwa)				
a. 1	3	5,4	2	2,7
b. 1 - < 3	31	5,3	32	43,8
c. 3 - < 5	17	31,0	31	42,5
d. ≥ 5	4	7,3	8	11,0
5. Pengalaman berusaha (tahun)				
a. < 12	6	10,9	11	15,1
b. 12 – < 20	24	43,6	33	45,2
c. 20 – < 28	14	25,5	21	28,8
d. ≥ 28	11	20,0	8	10,9
6. Pendapatan (x Rp 1000/bulan)				
a. < 420	5	9,1	2	2,7
b. 420 - < 750	29	52,7	29	32,7
c. 750 - < 1.080	15	27,3	20	27,4
d. ≥ 1.080	6	10,9	22	30,1

Sumber: Diolah dari data primer, 2006

5.2 Peran Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Menjembatani Kesenjangan

Menghadapi permasalahan masyarakat pesisir di lokasi kajian, maka dalam aplikasinya di lapangan, dapat dikomunikasikan program berikut:

- Peningkatan keterampilan nelayan dan keluarganya dalam mengelola hasil tangkapan, memperbaiki sikap yang merusak lingkungan dengan mensosialisasikan pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya alam;
- Peningkatan kemampuan manajemen usaha penangkapan dan diversifikasi usaha yang disertai

penguatan ekonomi keluarga melalui usaha produktif;

- Penguatan kelembagaan lokal termasuk organisasi pemasaran hasil perikanan;
- Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dengan mengedepankan prinsip sustainability (sumberdaya alam) dan kesejahteraan masyarakat; dan
- Membangun jejaring (*network*) dengan mitra usaha guna memperbesar armada dan menggunakan alat tangkap yang lebih efektif dan tidak merusak lingkungan.

Dengan demikian, pesan-pesan atau materi dalam komunikasi

pembangunan masyarakat pesisir tidak sekedar mentransferkan informasi saja, tetapi menyangkut aspek transformasi keadaan dari kondisi sekarang yakni nelayan dan keluarganya yang masih terpinggirkan, menjadi lebih mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Komunikasi pembangunan dapat memainkan peran dalam perubahan berencana, sebagaimana dikemukakan pula oleh S.C. Dube (1976), bahwa dalam pembangunan di India, komunikasi memegang peran nyata dalam mengembangkan media untuk memobilisasi masyarakat dan pemerintahnya.

Fenomena berlangsung di salah satu desa di Kecamatan Grokgak yakni di Desa Pemuteran adalah kerja sama antara nelayan dengan pecalang dalam pengelolaan kelestarian sumberdaya laut. Sebetulnya Desa Pemuteran sudah memiliki peraturan adat atau “*awig – awig*” yang menyebutkan bahwa setiap merusak lingkungan akan dikenakan sanksi, yakni pembinaan awal, yang apabila dilanggar sampai tiga kali maka ada sanksi khusus. Akan tetapi, kesadaran bahwa laut harus dipelihara kelestariannya sudah mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Seperti yang pernyataan seorang nelayan berikut:

“...kami nelayan di sini sangat kuatir dengan kegiatan pengeboman nelayan pencari ikan hias. Sudah banyak sekali karang-karang hancur dan ini menyebabkan rusaknya lingkungan di sini. Kami juga menjadi rugi, karena ndak bisa nangkap ikan banyak... mohon yang berwenang mengambil tindakan... dan kami juga kekurangan modal untuk mengembangkan usaha ...”

Komentar nelayan itu memperlihatkan bahwa nelayan sesungguhnya memiliki kepedulian atas degradasi

lingkungan yang dipicu oleh kebutuhan ekonomis. Nelayan mengeluhkan minimnya penegakan hukum dan modal yang terbatas untuk berusaha di bidang lain. Atas latar belakang inilah maka secara bertahap, sejak tahun 1993 diadakan pendekatan melalui pertemuan dengan tokoh-tokoh adat dan nelayan untuk menimbulkan kesadaran pemahaman pentingnya pemeliharaan laut, khususnya kawasan wisata. Usaha ini mulai menampakkan hasil yang menggembirakan. Beberapa tahun kemudian, kegiatan penangkapan ikan dengan bom dan potasium sudah berkurang dan penghasilan nelayan pun bertambah. Hal ini didukung oleh kerjasama antara pecalang dengan nelayan dalam pelarangan penangkapan ikan di kawasan wisata, serta pembuatan terumbu karang buatan.

Sejatinya, dalam kaitan pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat (PSPBM), Nikijuluw (2002) menyebutkan bahwa di beberapa daerah di Indonesia seperti Maluku, dalam menangkap ikan hanya menggunakan alat tangkap sederhana. Sedangkan di Irian Jaya menurut Nikijuluw (2002) menerapkan aturan bahwa jika penduduk suatu suku ingin menangkap ikan di perairan yang menjadi wilayah suku lain, maka teknologi yang digunakan harus sama. Kehadiran alat tangkap modern, cenderung mendesak nelayan kecil untuk meninggalkan daerahnya dan keluar dari perairan daerah asalnya, sehingga seringkali menimbulkan konflik antara nelayan satu dengan lain karena perebutan *fishing ground* dan penggunaan teknologi yang berbeda. Atas dasar pemikiran ini, maka sebenarnya peran program komunikasi pembangunan sangat luas mulai dari sekedar pentransferan informasi dan teknologi, pemberdayaan hingga peningkatan pemahaman masyarakat

akan nilai-nilai budaya lain (*able to understand*).

Hasil wawancara dengan perempuan nelayan di Desa Anturan memperlihatkan bahwa kaum perempuan masih berkuat pada persoalan domestik, belum ada inovasi yang sesuai dengan nilai-nilai lokal yang dapat mengefisienkan waktu untuk kegiatan domestik. Jika dapat diefisienkan, maka kaum perempuan ada kesempatan untuk mengembangkan diri dan keluarganya dalam kegiatan sosial ekonomi untuk peningkatan kualitas hidup keluarga. Pengolahan hasil perikanan tangkap untuk fish nugget belum menjadi minat nelayan setempat. Salah seorang perempuan nelayan berkata:

“...Saya ndak dikasih kerja macem-macem, yang penting jualan ikan ini dulu. Nantikan kalo laku, bisa buat mencari ikan lagi di laut. Kalo ngolah ikan pasti perlu ini itu dan tambah repot, iya kalo ada yang beli, kalo ndak ada yang beli, kan rugi...”

Terdapat tiga hal yang menyebabkan perempuan nelayan tidak ada peluang untuk mengelola usaha pengolahan ikan, yaitu (i) kebutuhan uang (cash) yang mendesak; (ii) keterbatasan waktu dan modal usaha; dan (iii) pemasaran. Dengan demikian, orientasi komunikasi pembangunan di kawasan pesisir cukup berat karena bukan hanya dituntut mampu mengubah pengetahuan, tetapi juga mengubah sikap dan membantu memperkuat struktur sosial ekonomi nelayan, sehingga lebih kuat dalam menghadapi tantangan.

5.3 Strategi Komunikasi Pembangunan pada Masyarakat Pesisir

Pelaksanaan program pemberdayaan di lokasi penelitian hingga tahun 1990-an masih belum berorientasi pada pengutamaan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2000 secara lebih intensif diterapkan pendekatan yang mengutamakan penyelesaian persoalan masyarakat (*problem solving*) dan berpusat pada kebutuhan masyarakat (*people centered development*). Pendapat masyarakat pesisir tentang pendekatan penyuluhan/pemberdayaan masyarakat dirangkum pada Tabel 4. Contoh kasus: pendekatan berpusat pada nelayan diterapkan pada program rehabilitasi karang sebagai salah satu pilihan atas solusi persoalan degradasi lingkungan. Selain itu, dikembangkan usaha penangkapan ikan hias yang ramah lingkungan untuk meningkatkan pendapatan nelayan melalui penggunaan jaring khusus (*stable net*).

Komunikasi pembangunan harus diselenggarakan secara partisipatif, sebab pendekatan ini memudahkan *agent of change* membantu masyarakat menyelesaikan persoalannya. Komunikasi pembangunan dapat dipandang sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, yang dalam kegiatannya berkaitan dengan orang dewasa. Implikasi hal ini, pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran orang dewasa (*adult learning approach*) dalam penyiapan dan penyelenggaraan perlu dipusatkan dalam kebutuhan nyata peserta proses belajar (Amanah 1996) atau lebih dikenal dengan *learner-centred approaches*. Orang dewasa merupakan orang yang sudah kaya pengalaman sebagaimana dikemukakan oleh (Simpson 1993) sehingga perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pembelajaran orang dewasa didasarkan pada pengalaman masa lalu dan patut dihargai.

2. Pengalaman masa lampau tersebut harus dihargai oleh peserta lainnya dan harus diupayakan diterapkan dalam proses belajar. Pembelajaran yang melibatkan transformasi pengalaman masa lalu membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar dibandingkan model belajar lainnya.
3. Lingkungan mempengaruhi kemampuan orang dewasa dalam belajar. Lingkungan terbaik seperti kondisi yang mengurangi gangguan pada orang dewasa yang sedang belajar akan memberikan dukungan yang berharga. Peserta dewasa akan belajar dengan baik di lokasinya sendiri. Orang dewasa tidak akan efektif jika belajar di bawah tekanan atau waktu yang dibatasi. Mereka tidak suka membuang waktu, dan orang dewasa lebih tertarik pada proses belajar yang memberikan hasil nyata yang nyata dan cepat.
4. Orang dewasa akan belajar bahan atau materi yang dia perlukan (selektif).
5. Orang dewasa dapat didorong untuk belajar pada materi yang relevan pada peran dan kehidupannya saat ini.
6. Orang dewasa belajar untuk kehidupannya dan untuk mereka yang terlibat dalam kelompoknya.

Tabel 4.

Pendapat Masyarakat Pesisir tentang Penyuluhan/Program Pemberdayaan di Lokasi Penelitian, 2009

No	Kecamatan	Uraian	Gerokgak			Buleleng		
			S (%)	TS (%)	Total (%)	S (%)	TS (%)	Total (%)
1		Metode partisipatori bermanfaat	85	15	100	90	10	100
2		Proses komunikasi harus berorientasi kepada perubahan perilaku	90	10	100	85	15	100
3		Harus bekerjasama dengan penyuluh	100	0	100	100	0	100
4		Prioritas kebutuhan nelayan diperhatikan	100	0	100	100	0	100
5		Perlu dukungan mitra usaha	100	0	100	100	0	100
6		Dukungan pemerintah dan swasta	90	10	100	90	10	100
7		Peran lembaga lokal dalam pemberdayaan	85	15	100	80	20	100

Keterangan: T = Setuju; TS = Tidak Setuju

Prinsip partisipasi dalam komunikasi pembangunan bukan sebatas proses sekedar hadir, memberikan pendapat atau hanya berdasarkan persepsi pemerintah atau penyuluh sendiri.. Sangat rasional, jika masyarakat pesisir belum mau terlibat dalam berbagai program pembangunan khususnya kegiatan penyuluhan karena sejak awal masyarakat tidak terlibat dalam menentukan kegiatan yang diprogramkan. Terkait dengan hal ini, proses aksi sosial dan proses pengambilan keputusan dalam model adopsi inovasi Rogers (1994) dapat dimodifikasi. Proses aksi sosial

meliputi lima tahap: (1) stimulasi minat (*stimulation of interest*) yaitu inisiatif dalam komunitas mulai berkembang pada tahap awal dalam ide baru dan praktek; (2) inisiasi (*initiation*) yaitu kelompok yang besar mempertimbangkan ide baru atau praktek, dan alternatif dalam implementasi; (3) legitimisasi (*legitimation*) merupakan tahap saat pimpinan komunitas memutuskan akan meneruskan tindakan atau tidak; (4) keputusan bertindak adalah rencana spesifik tindakan mulai dibangun; dan (5) aksi yaitu penerapan rencana (Donnermeyer *et al.* 1997). Model adopsi inovasi Rogers meliputi

lima tahap: (1) pengetahuan (*knowledge*) seseorang menjadi sadar akan adanya ide atau cara baru; (2) persuasi (*persuasion*) yaitu individu mulai mengembangkan sikap suka atau tidak suka terhadap ide tersebut, (3) keputusan (*decision*) adalah individu membuat keputusan awal untuk mengadopsi atau tidak ide tersebut; (4) implementasi (*implementation*) adalah individu mencoba ide atau cara baru tersebut untuk pertama kali; dan (5) konfirmasi (*confirmation*) adalah individu memutuskan menerapkan ide atau cara baru secara berulang dan dapat disertai modifikasi.

Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah pesisir tidak cukup hanya dengan mengidentifikasi isu yang dihadapi saja, tetapi perlu diwujudkan beberapa aspek yaitu adanya aspek situasional, kolaborasi dan evaluasi diri dari setiap unsur yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. *Agent of change* seyogyanya mampu mengembangkan empat aspek (Kemmis dan McTaggart 1988), yaitu:

- a. Suatu kondisi yang memungkinkan tumbuhnya kebersamaan dalam kelompok masyarakat dan rasa memiliki problem yang tengah dihadapi;
- b. Adanya kemampuan berkreasi dan pemikiran yang kritis;
- c. Program yang dilaksanakan adalah untuk tujuan perbaikan dan pengembangan; dan
- d. Kemampuan memfasilitasi masyarakat untuk membantu menyelesaikan masalah.

Keterlibatan masyarakat dalam program-program pengembangan dan proyek pembangunan dapat digolongkan kedalam tujuh tipe (Adnan *et al.*,

dalam Pretty 1995:173), seperti tampak pada Tabel 5.

Para pihak terkait dengan program komunikasi pembangunan perlu mengetahui tipe partisipasi masyarakatnya, sehingga dapat mengembangkan pendekatan yang dapat mempertahankan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayahnya. Idealnya, masyarakat memiliki tipologi keenam dan ketujuh. Meskipun demikian, jika masyarakat sudah berada pada tipologi kelima itu sudah bagus karena sudah ada langkah maju untuk berinisiatif membentuk dan mengembangkan organisasi di lingkungan mereka sendiri. Hal ini dapat dibanding dengan hasil penelitian Douglass and Sicilima di Tanzania (1997) tentang pelibatan masyarakat dalam dua pendekatan penyuluhan yaitu Latihan dan Kunjungan dan Sasakawa Global 2000.

Partisipasi pada kedua pendekatan belum menerapkan pendekatan partisipasi yang berimbang. Partisipasi masih ditekankan hanya pada pelaksanaan ketimbang pelibatan petani saat perencanaan dan evaluasi program. Tampak bahwa prinsip partisipasi bukanlah hal yang mudah untuk diterapkan. Penerapan metode partisipasi memerlukan proses yang bertahap. Penumbuhan partisipasi perlu dimulai dengan fasilitasi pada masyarakat pesisir tentang pentingnya keterlibatan yang bersangkutan pada kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus untuk memperbaiki hidup dan kehidupan. Pada tahap awal bentuk partisipasi bisa berupa pemanfaatan hasil-hasil penyuluhan (inovasi), lalu partisipasi akan lebih intensif secara bertahap, hingga akhirnya masyarakat mampu mandiri untuk mengelola kegiatannya dengan mobilisasi diri.

Tabel 5.

Tipologi Partisipasi Masyarakat menurut Adnan *et al.* (Pretty 1995)

Tipologi	Karakteristik
1. Partisipasi pasif	Masyarakat hanya berpartisipasi karena diperintah.
2. Partisipasi dalam memberikan informasi	Masyarakat berpartisipasi dengan menjawab kuesioner atau dalam wawancara tertentu.
3. Partisipasi melalui konsultasi	Masyarakat berpartisipasi dalam proses konsultasi. Agen pembaharu berperan dalam membantu masyarakat menyelesaikan persoalannya
4. Partisipasi dalam menyediakan materi penting dalam program/proyek	Masyarakat berpartisipasi dalam menyediakan sumberdaya seperti tenaga kerja, uang tunai, bahan pangan dsb.
5. Partisipasi fungsional	Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok yang bekerja untuk pengembangan organisasi setempat. Lembaga masyarakat ini masih bergantung sepenuhnya kepada fasilitator
6. Partisipasi interaktif	Masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama, guna penyusunan rencana kegiatan dan program yang akan dilaksanakan guna memperkuat kelembagaan yang telah dibentuk.
7. Mobilisasi diri	Masyarakat berpartisipasi dengan berinisiatif untuk mengubah sistem, bebas dari pengaruh institusi luar. Masyarakat bebas mengadakan kontak dengan dunia luar dalam rangka pengembangan sumberdaya dan sarana-sarana teknis yang dibutuhkan.

Sumber: Adnan *et al.* (dalam Pretty JN. 1995: 173)

5.4 Stakeholders yang dalam Komunikasi Pembangunan Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir merupakan sistem sosial, sehingga framework CATWOE ini relevan dengan proses transformasi masyarakat pesisir ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, pihak terkait yang dapat komunikasi pembangunan berorientasi pemberdayaan meliputi:

- *Customers*: Masyarakat pesisir termasuk nelayan dan anggota keluarganya,
- *Actors*: Pemuka masyarakat, agen pembaharu, penyuluh, ketua dan anggota kelompok nelayan,
- *Transformation*: proses perubahan berupa proses komunikasi pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan martabat masyarakat

pesisir, seperti kegiatan penguatan kelembagaan lokal (seperti lembaga pemasaran, kelompok nelayan), pengembangan kapasitas sumberdaya manusia setempat, pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan terpadu dan lain-lain.

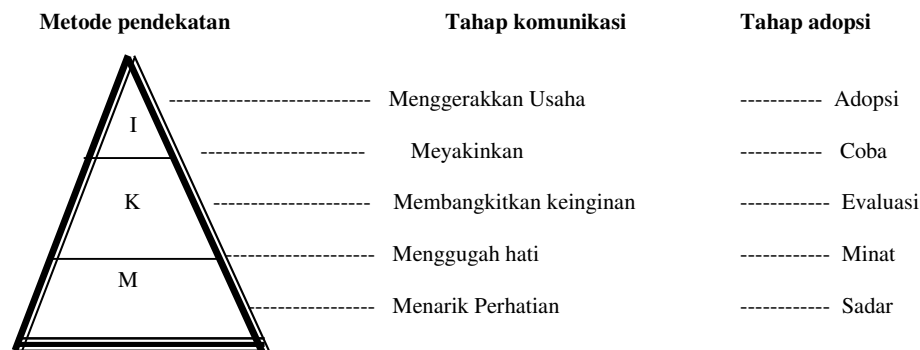
- *Welstanchaung* = *worldview*: pemahaman terhadap cara pandang, nilai-nilai lokal yang dianut oleh masyarakat pesisir, dan dihargai sebagai aset masyarakat setempat. Di wilayah penelitian, masing-masing kelompok nelayan memiliki *awig-awig* (peraturan yang dikelola oleh komunitas lokal dan didasarkan pada adat istiadat dan budaya Bali) sangat ditaati oleh nelayan dan masyarakat pesisir setempat.
- *Owners*: Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian,

pemerintahan desa dan kecamatan dan instansi terkait lainnya yang berfungsi mengembangkan masyarakat setempat

- *Environment*: kondisi lingkungan setempat perlu diperhatikan seperti kebijakan lokal apakah mendukung atau tidak terhadap program pemberdayaan masyarakat pesisir.

Sebagai sebuah sistem sosial, masyarakat pesisir tentunya memiliki struktur sosial tertentu, dan dikenalnya status dan peran pada tiap anggota masyarakat. Strategi komunikasi pembangunan pada masyarakat bersifat spesifik untuk tiap wilayah, setiap upaya perubahan perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti masalah sosial ekonomi, kondisi fisik lingkungan (sumberdaya alam), dan sumberdaya manusia secara umum (termasuk agen pembaharu). Unsur-unsur yang terlibat dalam komunikasi pembangunan berubah-ubah dan harus diantisipasi secepatnya. Perubahan merupakan proses alamiah yang tidak bisa dihindari, dan harus terjadi pada sesuatu, individu atau masyarakat sebagai reaksi atau adaptasi pada kondisi yang dihadapi. Proses perubahan pada masyarakat pesisir dalam konteks perubahan sosial ke arah yang lebih baik berkaitan dengan transformasi struktur dan interaksi

sosial dari sebuah masyarakat (Horton dan Hunt, dalam Garcia 1985) dan merupakan variasi atau modifikasi dalam pola organisasi sosial atau sub kelompok dalam masyarakat atau pada keseluruhan masyarakat itu sendiri (Panopio, Cordero, dan Raymund, dalam Garcia 1985). Dengan demikian, kendala-kendala yang dihadapi dan masalah yang timbul di antaranya adalah adanya keinginan untuk memper-tahankan *status quo* (*reluctant to change*) oleh sekelompok masyarakat yang dapat mempengaruhi proses perubahan. Sebagai mana diketahui, dalam teori adopsi-inovasi ada tahapan yang dilalui jika suatu ide baru diterapkan dan proses itu merupakan proses mental. Setiap tahap akan memerlukan waktu, pemikiran dan respon yang berlainan (*awareness, interest evaluation, trial*, dan keputusan apakah menolak ataukah menerima inovasi (pembaharuan – ide atau teknologi baru). Guna mengantisipasi hal ini, maka sangat relevan bagi agen pembaharu untuk menerapkan pendekatan penyuluhan yang tepat sesuai dengan tahapan komunikasi yang sedang berlangsung di masyarakat (Gambar 3).



Gambar 3. Kaitan antara Metode Pendekatan, Tahap Komunikasi dan Tahap Adopsi (Keterangan: I = Individu; K = Kelompok dan M = Massal)

Terdapat tiga pilihan metode pendekatan atau kombinasi ketiganya yang dapat digunakan dalam pelaksanaan program ketahanan pangan, yaitu:

- a. Pendekatan perorangan, misalnya kegiatan kunjungan perorangan, konsultasi ke rumah, penggunaan surat atau telepon, dan magang.
- b. Pendekatan kelompok, misalnya kursus tani-nelayan, demonstrasi cara atau hasil, kunjungan kelompok, karyawisata, diskusi kelompok, ceramah, pertunjukan film, slide, karyawisata, penyebaran brosur, buletin, folder, liptan, asah terampil, sarasehan, rembug utama atau madya, temu wicara, temu usaha, temu karya, temu lapang.
- c. Pendekatan massal seperti pameran, Pekan Nasional (Penas), Pekan Daerah (Peda), pertunjukkan film atau wayang, drama, penyebaran pesan melalui siaran radio, televisi, surat kabar, selebaran atau majalah, pemasangan poster atau spanduk dan sebagainya.

6. Simpulan

Kondisi masyarakat pesisir dan nelayan di lokasi penelitian belum terbebas dari persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil menengah meliputi, akses terhadap aset dan sumber-sumber modal terbatas, kebutuhan akan penguatan kelembagaan kelompok untuk pengembangan kapasitas pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Peran penting komunikasi pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir adalah menjembatani kesenjangan yang terjadi antara kondisi masyarakat saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai melalui proses-proses komunikasi yang partisipatif, dialogis, dan memotivasi.

Strategi komunikasi pembangunan untuk wilayah pesisir hendaknya

spesifik lokasi, dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: (i) Program pembangunan perlu menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan non fisik, tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi harus menanamkan modal manusia untuk masa depan; (ii) Pesan-pesan dalam komunikasi pembangunan tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat nelayan, dan ditransformasikan kepada masyarakat melalui metode-metode yang relevan dengan situasi dan kondisi setempat, (iii) Diperlukan perencanaan yang matang dalam rancang bangun strategi komunikasi pembangunan, melibatkan peran serta masyarakat pesisir dan *stakeholders* terkait dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga tindak lanjut, dan (iv) Sinkronisasi dan koordinasi antar *stakeholders* terkait dengan masyarakat pesisir dapat menjamin keberlanjutan program pembangunan dan mendorong terwujudnya struktur sosio-ekonomi masyarakat lokal yang kuat.

Daftar Pustaka

- Adnan, S. Barrett A, Nurul Alam S M and Brustinow, A. 1995. People's Participation. NGOs and the Flood Action Plan. Dalam J. N. Pretty. Regenerating Agriculture. London: Earthscan Publication Ltd.
- Amanah, S. 1996. A Learner-Centred Approach to Improve Teaching and Learning Process in Agricultural Polytechnic in Indonesia. Thesis. Australia: University of Western Sydney.
- Amanah, S. 2007. Kearifan Lokal dalam Pengembangan Komunitas Pesisir. Bandung: CV. Citra Praya.
- Amanah, S., Fatchiya, A. dan Dewi, S. 2004. Pemodelan Penyuluhan Perikanan Pada Masyarakat

- Pesisir Secara Partisipatif. Laporan Penelitian Hibah Bersaing X. IPB, Bogor.
- Amanah, S. dan Yulianto, G. 2002. Profil Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan Menunjang Kinerja DKP di Era Globalisasi. Jakarta: STP (dulu AUP).
- Bowling, Chester J., dan Barbara A. Brahm. 2002. Shaping Communities through Extension Programs. *Journal of Extension*, June 2002 Volume 40 Number 3.
- Checkland, P. 1984. Systems Thinking, System Practice. Chichester: John Wiley & Sons.
- Dahuri, R. 2000. Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan Untuk Kesejahteraan Rakyat (Kumpulan Pemikiran DR. Ir. Rokhmin Dahuri, MS). Jakarta: LISPI (Lembaga Informasi dan Studi Pembangunan Indonesia) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pesisir, Pantai dan Pulau-Pulau Kecil, Dep. Eksplorasi Laut dan Perikanan.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Buleleng. 2003. Data Perikanan Kabupaten Buleleng Tahun 2002. Singaraja: Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Direktur Jenderal Perikanan, 2000. Visi dan Misi Pembangunan Perikanan. Jakarta: Dep. Perikanan dan Ilmu Kelautan.
- Donnermeyer, Joseph F., Barbara A. Plested, Ruth W. Edwards, Gene Oetting, dan Lawrence Littlethunder. 1997. "Community Readiness and Prevention Programs." *Journal of the Community Development Society*, Vol. 28. No.1: 65-83.
- Douglass, M dan Sicilima, N. 1997. A Comparative Study of farmers' Participation in Two Agricultural Extension Approaches in Tanzania. *Journal of International Agricultural and Extension Education*. Volume 4, Number1, Spring 1997
- Dube, S.C. 1976. Development Change and Communication in India. Dalam Schramm, W dan Lerner, D.(editors). *Communication and Change: The Last Ten Years – and The Next*. Honolulu: An East-West Center Book, The University Press of Hawaii.
- Garcia, M.B. 1985. *Sociology of Development: Perspective and Issues*. Philippines: National Book Store, Inc.
- Hanson, A. J. 1984. Coastal Community: International Perspectives. Paper Presented at the 26 th Annual Meeting of the Canadian Commission for UNESCO, St John's Newfoundland, 6 th June 1984.
- Harris, Elayne M. 1996. The Role of Participatory Development Communication as a Tool of Grassroots Nonformal Education: Workshop Report. Dalam Guy Bessette and C.V. Rajasundaram (Editor) . *Participatory Development Communication: A West African Agenda*. The International Development Research Centre: Science for Humanity.
- Kemmis, Stephen dan MacTaggart, Robin. 1988. *The Action Research Planner*. Melbourne: Deakin University Press.
- Kifli, Gontom C. 2007. Strategi Komunikasi Pembangunan pada Komunitas Dayak di Kalimantan Barat. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 25 No. 2, Desember 2007 : 117 – 125
- Mubyarto, Sutrisno L, dan Dove, M. 1984. *Nelayan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rajawali.
- Nasution, Zulkarimen. 2004. *Komunikasi Pembangunan*:

- Pengenalan Teori dan Penerapannya. Edisi Revisi. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada.
- Nikijuluw, Victor. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Jakarta: Kerjasama Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional (P3R) dengan PT Pustaka Cidesindo.
- Payne, Malcolm. 1997. *Modern Social Work Theory*. Edisi Kedua. London: MacMillan Press Ltd.
- Pretty, J. N. 1995. *Regenerating Agriculture*. London: Earthscan Publication.
- Rogers, Everett M 1994. *The Diffusion Process*. Edisi Keempat. New York: The Free Press.
- Satria, A. 2000. *Dinamika Modernisasi Perikanan, Formasi Sosial dan Mobilitas Nelayan*. Humaniora Utama Press, Bandung.
- _____. 2001. *Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.
- Shumsky, A. 1988. *Cooperation in Action Research: A Rationale*. Dalam Kemmis, S dan R. McTaggart (eds). *The Action Research Reader*. Victoria, Melbourne: Deakin University Press.
- Simpson, I. 1993. *Rural Extension – A Change in Emphasis*. Proceedings of the Workshop: Defining/redefining Extension Practice Science Leaders' Group. Goulburn: NSW Agriculture.
- Soedijanto, 1997. *Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) sebagai Salah Satu Alternatif model Penyuluhan untuk Mendukung Pembangunan Pertanian di Awal Datangnya Millenium Baru*. Presentasi Pertemuan Penyegaran Pemandu Lapangan. Malang: Univ. Brawijaya.
- Van den Ban, A.W. dan HS. Hawkins, 1999. *Agricultural Extension*. London: Elsevier.
- Waskita, Djaka. 2005. *Komunikasi Pembangunan untuk Pemberdayaan*. Jurnal Organisasi dan manajemen. Vol 1. No. 1, September 2005.